



Potensi Pajak Hilang

Rp3,5 Miliar

■ Pemkot Yogyakarta Belum Klarifikasi Temuan

BPK ke Panitia Khusus

DAFTAR INVENTARIS MASALAH LHP BPK 2016

- Ada 12 item yang berada dalam daftar inventaris masalah (DIM) lanjutan Pansus LHP BPK tahun 2016.
- Di antaranya wajib pajak hotel tak menyetorkan pajak tahun 2016 senilai Rp474,6 juta.
- Pendapatan reklame dari reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya yang berpotensi tidak dapat direalisasikan senilai Rp953 juta.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang belum diterbitkan pada wajib pajak BPHTB sebesar Rp145 juta.
- Ketidakejelasan wajib pajak (WP) hotel yang berpiutang Rp590 juta.
- Belum terselesaikannya pajak satu hotel berbintang Rp493,8 juta.
- Kios los tutup dan memiliki tunggakan atau kekurangan bayar senilai Rp36,1 juta.
- Piutang retribusi pasar sampai dengan November sebesar Rp493,6 juta.
- Bunga kekurangan pembayaran retribusi sebesar Rp 26,8 juta.
- Retribusi sampah kurang bayar senilai Rp363,2 juta.
- Total potensi temuan kurang bayar atau tidak tertagih mencapai Rp3,585 miliar.

YOGYA. TRIBUN - Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan klarifikasi pada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (31/5) besok. Klarifikasi ini dilakukan atas beberapa temuan yang masuk ke dalam LHP BPK dengan total potensi temuan kurang bayar atau tidak tertagih Rp3,585 miliar.

"Kami akan segera melakukan klarifikasi sebelum nantinya kami susun kesimpulan akhir," jelas Ketua Pansus Pembahasan LHP BPK, Nasrul Khoiri, Senin (29/5).

Menurutnya, klarifikasi ini ditujukan untuk me-

Kami akan segera melakukan klarifikasi sebelum nantinya kami susun kesimpulan akhir

Nasrul Khoiri

ngetahui seberapa jauh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan penagihan pada beberapa item yang kurang bayar atau pajak tertunggak.

● ke halaman 14

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Potensi Pajak Hilang Rp3,5 M

• Sambungan Hal 13

Pasalnya, pihaknya telah menerima informasi adanya proses administrasi penagihan pada wajib pajak. Namun, belum mengetahui perkembangan dari penagihan ini karena belum mendapatkan laporan.

Sebelumnya, Pansus memberi tenggat waktu hingga akhir Mei ini bagi Pemkot Yogyakarta untuk menjalankan rekomendasi BPK menagih tunggakan pajak. Namun, hingga pekan kedua bulan Mei, pansus belum menerima laporan berapa tunggakan yang berhasil ditagih.

"Dari klarifikasi yang kami lakukan nanti, kami akan mengetahui seberapa jauh tindak lanjut pada angka-angka yang menjadi temuan BPK. Apakah sudah tertagih, tidak tertagih, atau belum tertagih," urai politikus Partai Keadilan Sejahtera

ra (PKS) ini.

12 item

Nasrul menyebutkan, ada 12 item yang berada dalam daftar inventaris masalah (DIM) lanjutan Pansus LHP BPK tahun 2016. Beberapa di antaranya adalah wajib pajak hotel tak menyetorkan pajak tahun 2016 senilai Rp474,6 juta. Kemudian, pendapatan reklame dari reklame yang tak berizin dan habis masa izinnnya yang berpotensi tidak dapat direalisasikan senilai Rp953 juta.

Selain itu, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB) yang belum diterbitkan pada wajib pajak BPHTB sebesar Rp145 juta, ketidakjelasan wajib pajak (WP) hotel yang berpiutang Rp590 juta, dan belum terselesaikannya pajak satu hotel berbintang sebesar Rp493,8 juta.

Item lainnya, yakni kios los tutup dan memiliki tunggakan atau kekurangan bayar senilai Rp36,1 juta, piutang retribusi pasar sampai dengan November

sebesar Rp493,6 juta, dan bunga kekurangan pembayaran retribusi sebesar Rp26,8 juta. Serta, retribusi sampah kurang bayar senilai Rp363,2 juta.

"Total potensi temuan kurang bayar atau tidak tertagih mencapai Rp3,585 miliar. Kami hanya mencatat beberapa angka temuan yang besar-besar," jelasnya.

Pihaknya pun menduga beberapa wajib pajak yang menunggak ini dikarenakan adanya kesan pembiaran dari Pemkot. Sehingga, pajak tidak tertagih dan menjadi persoalan di beberapa tahun sebelumnya.

"Kami akan mengetahui komitmen Pemkot untuk penagihan pajak tertunggak. Contohnya, kasus pajak Saphir dalam kurun waktu 2011 dan 2012 senilai Rp493 juta harus ada jawabannya. Karena, ada pergantian pemilik juga di situ," ulasnya.

Pihak terkait

Dia juga menyebut, pihaknya sejak awal Maret lalu ini

sudah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai klarifikasinya. Di antaranya tim auditor BPK DIY, jajaran Pemkot, para wajib pajak, hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY.

Adapun, pansus LHP BPK akan bekerja sampai akhir Mei. Pihaknya juga akan membuat laporan untuk menjadi pertimbangan bagi eksekutif menyusun rencana kerja tahun 2018. Sehingga, persoalan administrasi dan penagihan tuntas.

Seperti diketahui, dalam LHP-nya, BPK merekomendasikan BPKAD Yogyakarta melakukan tahapan-tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, hingga penyitaan aset. Selain itu, BPKAD juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari. (ais)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005